

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, terdapat analisis teoretis yang menjadi dasar bagi penelitian ini. (Sahir, 2021 hlm. 25) mencakup beberapa konsep literatur yang relevan, peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan disusun secara sistematis. Beberapa konsep teoritis yang disajikan secara mendalam yang akan dibahas melibatkan transformasi, ketuhanan, Pancasila, masyarakat, tradisi kebudayaan, serta keterkaitan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada budaya ruwatan bumi di Kampung Adat Banceuy (Afifuddin, 2012 hlm. 7).0020

##### 1. Definisi Transformasi

###### a. Ruang Lingkup Transformasi

Dalam (Nain, 2021 hlm. 9) masyarakat seringkali mengalami perubahan, baik secara dahsyat maupun skala kecil saja serta terjadi secara lambat. Secara Etimologi Transformasi berasal dari 2 kata yakni *trans* dan *form* kata *trans* ini diartikan sebagai melintasi dari suatu sisi ke sisi yang lainnya, dan kata *form* adalah bentuk. Menurut (Zaenny, 2010 hlm. 9) menyatakan bahwa transformasi adalah perubahan dari kondisi sebelumnya dapat terjadi terus menerus atau berulang kali cepat lambat berhubungan dengan perubahan yang menyangkut sosial, budaya, ekonomi, fisik bahkan non fisik.

Dikutip dari KBBI, transformasi merujuk pada bentuk perubahan yang melibatkan perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi yakni bagian dari suatu proses dan fenomena perubahan bentuk di bawah keadaan yang berubah, (Nain, 2021 hlm. 10). Transformasi di sini merupakan proses perubahan bentuk yang tidak terbatas, terjadi dalam keadaan yang berubah-ubah. Dalam konteks penelitian ini, fokus diberikan pada transformasi dalam aspek budaya, yang mencakup transformasi sosial budaya, menggambarkan proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya, *D'Arcy Thompson* didalam (Stephanie & Johansen, 2011, hlm. 120).

Penting untuk dicatat (Nain, 2021 hlm. 9) bahwa masyarakat dan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Aturan kesusilaan, hukum, dan

lembaga-lembaga terus mengalami perubahan, yang berdampak pada perubahan lainnya secara timbal balik dan kompleks. Dalam wacana keislaman, Tuhan dan negara seringkali bertabrakan, memprioritaskan Islam sebagai ideologi sosial adalah untuk merubah tatanan masyarakat sesuai dengan visi transformasi sosialnya. Setiap ideologi sosial berupaya merubah masyarakat menuju tatanan yang dianggap ideal (Edi Gunawan, 2017 hlm. 106).

Teori-teori sosial yang dihasilkan dari pertanyaan utama ini menjelaskan kondisi masyarakat saat ini serta memberikan wawasan tentang perubahan dan transformasinya (Nain, 2021, hlm. 10). Teori-teori ini, termasuk teori Marx (Taufiq, 2013 hlm. 116), memiliki sifat transformatif, artinya mereka tidak hanya berupaya menafsirkan realitas empiris tetapi juga mengubahnya. Hampir semua teori sosial saat ini memiliki tujuan transformatif, yang berarti mereka tidak hanya berusaha untuk memberikan penjelasan antropologis, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan sesuai dengan paradigma yang mereka anut (Syahrizal, 2015 hlm. 165).

Perubahan dalam masyarakat (Nain, 2021, hlm. 10) berlangsung melalui pengenalan elemen-elemen baru. Elemen-elemen baru ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui penemuan (invensi) Fenomena yang timbul di dalam suatu komunitas dan dipengaruhi oleh interaksi dengan komunitas lain (Davis, 1960, hlm. 7). Menurut Syamsir Salam, ada tiga tahapan setidaknya dalam proses perubahan struktur dan fungsi sistem-sistem sosial:

- 1) Invensi yakni proses perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.
- 2) Difusi yakni ketika ide atau gagasan dari luar disampaikan ke dalam masyarakat.
- 3) Konsekuensi yakni hasil dari adopsi perubahan tersebut.
- 4) Perubahan, baik internal maupun eksternal, tidak selalu berdampak sama; ada yang kecil dan tidak signifikan, ada yang lambat dan sering diwakili oleh pemimpin. Perubahan lebih mudah terjadi jika masyarakat terbuka terhadap hal-hal baru (Ernita Dewi, 2012 hlm. 113).

#### **b. Tujuan Umum Transformasi**

Transformasi berperan dan digunakan untuk mengubah atau mengadaptasi sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu yang diinginkan (Nain, 2021 hlm. 9). Pada proses ini melibatkan modifikasi komposisi untuk menciptakan suatu tampilan baru. Transformasi mempermudah pembuatan objek simetris dan

memungkinkan pengamatan objek dari sudut pandang yang berbeda. Proses perubahan bertahap yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal melalui pengulangan terus-menerus (Anthony Antoniadis, 1990 hlm. 120).

## **2. Teori Ketuhanan**

### **a. Definisi Tuhan**

Dalam budaya Yunani, Pada buku Filsafat Pancasila (Kaelan, 2009 hlm. 145) konsep Tuhan diawali dengan kata "*deus*" yang mengacu pada dewa *Zeus*, dan seiring perkembangannya, masyarakat menggunakan kata "*Theos*" untuk merujuk kepada Tuhan. Hubungan Negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, manusia sebagai pendukung pokok negara dan Tuhan sebagai kausa prima (sebab utama atau pertama). Aristoteles menginterpretasikan Tuhan sebagai penggerak alam dalam teori *actus* potensi alam, di mana alam memiliki potensi untuk melakukan perubahan sesuai dengan tujuannya. Aristoteles percaya bahwa Tuhan adalah penggerak pertama dalam kehidupan alam ini. Berdasarkan pemahaman Tuhan seperti itu, dalam dinamisme kekuatan gaib yang misterius, Tuhan dianggap sebagai kekuatan utama. Dalam animisme, roh dianggap sebagai Tuhan, sementara dalam agama Kristen, Allah Tritunggal dan dalam agama Islam Allah SWT dianggap sebagai Tuhan Ilah, Allah, (Rohman, 2019 hlm. 10) .

Argumentasi Ontologis ini terutama diajukan oleh Anselmus (1033-1109) Terkait dengan keberadaan sesuatu yang bersifat mutlak dilansir dari Buku Filsafat Agama (Magdalena, 2018 hlm. 14). Secara etimologis, "*Ilah*" memiliki makna sebagai yang disembah, baik dengan kebenaran atau ketidakbenaran. Jika seseorang menyembah hawa nafsunya dan selalu mengikuti keinginannya, maka hawa nafsu tersebut dianggap sebagai Ilah atau Tuhannya yang disembah. Dalam tradisi *Judeo-Kristen*, Tuhan digambarkan sebagai "*tiga omni*," yang artinya Mahakuasa (*omni potent*), Mahakasih (*omni benevolent*), dan Mahatahu (*omni cest*). Tuhan dalam pandangan masyarakat Jawa juga memiliki beragam penamaan seperti Sang Among, Tuwuh, Kang Paring Gesang, Hyang Jagad Nata, Sang Hyang Tunggal, Batara Tunggal, dan lainnya. Menurut Franz Magnis Suseno, pandangan masyarakat Jawa terhadap Tuhan tidak hanya terbatas pada pengertian sempit, melainkan tercermin dalam berbagai ritus, seperti upacara menanam dan panen padi serta upacara keagamaan lainnya (Rohman, 2019 hlm. 10).

Menurut (Leight, Keller dan Calhoun, 2017 hlm. 11), Sejalan dengan hal tersebut, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya Kepercayaan dalam hal beragama yang diartikan sebagai pedoman yang dianggap benar tanpa mempermasalahkan keraguan yang ada
- 2) Adanya simbol agama menjadi sebagai suatu lambang atau identitas sesuai dengan ajaran agama yang diyakini
- 3) Adanya praktik-praktik keagamaan yang melibatkan tindakan atau interaksi antara individu dan Tuhan, atau antara individu dengan sesama, sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh para pengikutnya.
- 4) Adanya pengalaman keagamaan yang telah diartikan menjadi bentuk pengalaman baik spiritual maupun sosial yang dialami oleh para pemeluk agama yang telah dianutnya
- 5) Adanya umat beragama yang dapat dikatakan sebagai penganut dari tiap agama yang dianutnya masing-masing.

Bisa disimpulkan bahwasannya beberapa unsur pokok agama terbagi menjadi beberapa jenis pembeda nya ada pada konteks yang berbeda (Argyo, 2017 hlm.11).

## **b. Konsep Ketuhanan**

Menurut Plato dalam (Weismann, 2015 hlm. 13) konsep Tuhan, yang digambarkan sebagai (*Demios*) *Demiurge* atau Sang Pencipta, telah melalui perjalanan panjang dan kompleks dalam sejarah manusia. Kehendak dan keyakinan terhadap Tuhan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia, dan hubungan historis antara manusia dengan sesuatu yang dianggap Mahakuasa mencakup dinamika yang sangat panjang. Negara harus selalu mematuhi nilai-nilai ilahi dari wahyu Tuhan (Kaelan, 2009 hlm. 146) Manusia secara terus-menerus mencari bentuk kepercayaan pada kekuatan gaib sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sejarah panjang ini telah membentuk tradisi dan tata nilai yang diwariskan turun-temurun, menjadi pondasi bagi budaya dalam melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Nilai-nilai ini secara kokoh tertanam dalam kebiasaan yang stabil dan cenderung mengalami perubahan dengan lambat (Weismann, 2015 hlm. 13).

(Darda Abdullah Sjam, 2009) bahwa peradaban suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup warganya agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, berilmu, terampil, kreatif, dan mandiri, maka keberhasilan sistem pendidikan nasional akan menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Pembagian keyakinan menjadi dinamisme dan animisme dianggap sebagai titik awal dari keyakinan yang dianut oleh semua manusia. Meskipun pemahaman

ini telah berkembang, fenomena dan praktiknya masih menunjukkan kesamaan dengan masyarakat primitif, seperti meminta bantuan kepada dukun atau menggunakan objek tertentu untuk melindungi diri dari bahaya. Dalam filsafat agama, konsep perubahan sistem kepercayaan pada hal-hal gaib sangat penting, dengan keyakinan pada zat gaib dan suci, serta beragam konsep Tuhan seperti dinamisme, animisme, politeisme, trinitisme, panteisme, dan monoteisme (Lilik Umami Kaltsum; Dasrizal; M. Najib Tsauri, 2022 hlm. 18)

### **1) Animisme**

Istilah "Animisme" (Kasno, 2018 hlm. 34) asal-usulnya dari bahasa Latin, yaitu "anima," yang berarti roh atau nyawa. Setiap budaya memiliki kepercayaan animisme yang memandang bahwa makhluk halus dan roh ada di sekeliling mereka. Keyakinan ini seringkali dipegang oleh masyarakat yang belum diberi pengajaran agama yang bersifat wahyu. Mereka meyakini bahwa setiap entitas di dunia ini, mulai dari lautan hingga gunung, dari hutan hingga gua, memiliki roh yang perlu dihormati untuk menjaga hubungan harmonis dengan manusia dan bahkan dapat memberikan pertolongan dalam kehidupan sehari-hari (Lilik Umami Kaltsum; Dasrizal; M. Najib Tsauri, 2022 hlm. 19).

### **2) Monotheisme**

Monotheisme (Kasno, 2018 hlm. 39) Berdasarkan pemahaman bahwa tidak ada entitas lain yang disebut Tuhan selain Dia, serta ajaran bahwa Tuhan adalah zat yang Mahasempurna yang telah disampaikan oleh para Nabi dan Rasul di masa lalu, dapat disimpulkan bahwa konsep monotheisme, seperti yang diajarkan dalam Islam sebagai Tauhid, menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan di seluruh alam semesta ini, yang mencipta dan mengatur segala yang ada, tanpa ada yang menyamai-Nya atau menandingi-Nya dalam bentuk, sifat, maupun perbuatan-Nya (Ningratna, 2021 hlm. 150).

### **3) Dinamisme**

Dinamisme, (Kasno, 2018 hlm. 35) yang berasal dari bahasa Yunani "*Dunamos*" atau dalam bahasa Inggris disebut "*Dynamic*," memiliki arti kekuatan, daya, atau kekuasaan. Definisi dinamisme merujuk pada kepercayaan terhadap keberadaan kekuatan gaib pada benda-benda di sekitar manusia. Dalam Ensiklopedia Umum, dinamisme dijelaskan sebagai bentuk kepercayaan

keagamaan primitif yang ada sebelum agama Hindu tiba di Indonesia (Lilik Ummi Kaltsum; Dasrizal; M. Najib Tsauri, 2022 hlm. 150). Dinamisme, kadang-kadang disebut preanimisme, mengajarkan bahwa setiap objek atau makhluk memiliki kekuatan inheren. Keyakinan ini mengakui adanya kesaktian dan kekuatan dalam substansi suatu objek, yang diyakini dapat memberikan manfaat atau bahaya. Kesaktian dapat berasal dari berbagai elemen seperti api, batu, air, tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Dinamisme muncul karena manusia merasa bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Manusia selalu mencari substansi atau kekuatan lain yang dapat memberikan bantuan, menenangkan, dan cenderung menyembahnya. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang menyadari bahwa api dapat memberikan panas, mungkin dia berpikir bahwa api layak dihormati karena memberikan bantuan saat dia merasa kedinginan. Oleh karena itu, dinamisme mengarah pada penyembahan terhadap sesuatu selain Allah, karena manusia mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep Tuhan dengan benar (Lilik Ummi Kaltsum; Dasrizal; M. Najib Tsauri, 2022 hlm. 150).

#### **4) Triteisme**

Trinitas dalam buku filsafat agama (Magdalena, 2018 hlm. 102) Trinitas yakni doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam tiga pribadi yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ketiga pribadi ini bertugas sebagai pencipta, pemelihara, dan pemusnah. Dalam agama Hindu, konsep serupa dikenal sebagai Trimurti, yang terdiri dari Brahma, Siwa, dan Wishnu. Sementara dalam agama Nasrani, doktrin ini dikenal sebagai Trinitas, yang terdiri dari Yesus, Bunda Maria, dan Roh Kudus. Konsep trinitarianisme ini bisa dianggap sebagai kelanjutan dari kepercayaan politeisme, yang awalnya mengakui keberadaan banyak dewa, tetapi kemudian dirinci menjadi tiga dewa (Nova, 2021 hlm. 98).

#### **5) Polytheisme**

Politheisme (Kasno, 2018 hlm. 36) menyatakan bahwa penyembahan kepada banyak Tuhan, terdapat banyak Tuhan atau Dewa. Dalam perjalanan waktu, terdapat pola di mana Dewa-dewa atau Tuhan-tuhan dalam politeisme awalnya memiliki kedudukan yang relatif sama. Namun, secara bertahap, sebagian di antara mereka mulai mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, dalam agama Yunani, Dewa Zeus diberikan posisi tertinggi di antara para

Dewa lainnya. Meskipun dalam beberapa tempat terdapat Dewa dengan kedudukan unik, hierarki di antara Dewa-dewa ini tidak selalu seragam, meskipun keberadaan mereka tetap diakui. Pengikut politeisme, dalam praktiknya, akan memberikan penghormatan kepada semua Dewa yang mereka yakini. Mereka percaya bahwa walaupun Dewa-dewa tersebut memiliki perbedaan, namun mereka tetap bekerja bersama-sama dalam melaksanakan tugas-tugas mereka (Ningratna, 2021 hlm. 149).

### **6) Pantheisme**

Pantheisme (Kasno, 2018 hlm. 45) berasal dari tiga kata, yaitu "*pan*" yang artinya seluruh, "*theo*" yang berarti Tuhan, dan "*ism*" yang menunjukkan suatu paham. Oleh karena itu, pantheisme dapat diartikan sebagai pandangan bahwa seluruhnya adalah Tuhan. Dalam paham ini, Tuhan dianggap meliputi segala yang ada dalam alam secara menyeluruh. Pantheisme menganggap semua yang dapat dirasakan sebagai bagian dari Tuhan yang imanen dan satu kesatuan dengan alam, yang dianggap sebagai ilusi atau khayalan karena selalu berubah, sedangkan Tuhan yang kekal adalah satu (Ningratna, 2021 hlm. 152)

## **3. Teori Pancasila**

### **a. Kebenaran Pancasila**

Dalam sebuah lingkup perbincangan tentang kefilosofatan yang bersifat filosofis (Kaelan, 2018 hlm. 12), Sistem filsafat Pancasila harus memenuhi tiga teori kebenaran: koherensi, korespondensi, dan pragmatik, agar menjadi kokoh dan tahan terhadap sistem filsafat lainnya (Surajiyo, 2022 hlm. 54).

#### **1) Teori Koherensi**

Bagi teori kebenaran ini, (Kaelan, 2009 hlm. 14) Jika dalam konteks buku filsafat Pancasila, maka jika suatu pernyataan sebelumnya telah diakui sebagai benar, maka pernyataan berikutnya yang sejalan dengan itu juga akan dianggap tepat secara konseptual. Sebagai contoh, Pancasila dipandang sebagai fondasi filsafat negara yang terdiri dari beberapa elemen yang terpadu, tanpa adanya kontradiksi di antara mereka. Setiap bagian Pancasila dianggap mutlak, dan penghilangan satu bagian akan mengakibatkan kehilangan bagian lainnya. Pada setiap sila Pancasila, terdapat keterkaitan dan kualifikasi yang saling berkaitan. Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sila, mencerminkan ketuhanan yang

berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Ditinjau dari hubungan logis dan runtut antar-sila ini mencerminkan penerapan teori koherensi (Kaelan, 2009 hlm. 15).

Dapat disimpulkan bahwa suatu bagan pemikiran kefilsafatan telah dianggap runtut koheren apabila tidak terdapat suatu pertentangan dan terdapat suatu hubungan (Kattsoff, 1986 hlm. 8) dalam (Kaelan 2009 hlm. 15). Hubungan logis, sebagai manifestasi teori koherensi, terlihat dalam struktur hierarkis Pancasila yang dipandang oleh Notonagoro sebagai piramidal, menunjukkan urutan yang tidak dapat dibalik. Ini mencerminkan tingkatan yang luas dan beragam dalam konten serta sifatnya. Sila-sila yang berada di bagian belakang memiliki cakupan yang lebih spesifik tetapi memiliki lebih banyak konten dan sifat (Suhadi, 1980 hlm. 69).

Selain itu, Pancasila diterjemahkan menjadi empat asas yang konsisten dengan pasal-pasal UUD 1945, menunjukkan kesesuaian dan konsistensi antara sila-sila Pancasila, asas, dan pasal-pasal UUD 1945. (Bakry, 1994 hlm. 47). Oleh karena itu, dalam Filsafat Pancasila, teori kebenaran koherensi diakui dan diterapkan (Budisutrisna, 2006 hlm. 69).

## **2) Teori Korespondensi**

Menurut penjabaran teori korespondensi (Kaelan, 2018 hlm. 1), Suatu pernyataan dianggap benar jika isi pengetahuannya sesuai dengan maksud pernyataan tersebut. Pancasila, sebagai konsepsi filsafat, dianggap sebagai inti dari identitas bangsa Indonesia yang mencakup karakteristik, pandangan hidup, dan prinsip-prinsip panduan bagi masyarakat Indonesia, pernyataan tersebut benar jika sesuai dengan realitas sehari-hari (Bakry, 1994 hlm. 49). Notonagoro (1975 hlm. 17) juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat Pancasila dalam tiga bidang, yaitu budaya, agama, dan pemerintahan. Dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mencerminkan makna konseptual, umum, dan universal dari Pancasila sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam realitas kehidupan (Budisutrisna, 2006 hlm. 69).

Menurut (Notonagoro, 1975 hlm. 38) dalam karyanya Filsafat Pancasila (Kaelan, 2018 hlm. 203), terdapat keterkaitan yang tak terelakkan antara Pancasila dan bangsa Indonesia, yang dapat diilustrasikan sebagai hubungan sebab-akibat



(Soeprapto, 1996 hlm. 3). Semua aspek, mulai dari karakteristik bangsa hingga interaksi sosial, harus sejalan dengan prinsip-prinsip mendasar yang terdapat dalam sebabnya. Oleh karena itu, Menurut pandangan filsafat Pancasila, kebenaran berarti bahwa setiap elemen dalam Pancasila harus sejalan atau selaras, sesuai, dan tercermin dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara. Prinsip-prinsip dalam Pancasila ini yang seharusnya memiliki korespondensi atau kesesuaian dengan tujuan mereka (Budisutrisna, 2006 hlm. 69).

### **3) Teori Pragmatik**

Sejarah mencatat bahwa sejak Pancasila diakui sebagai dasar negara dan dalam menghadapi berbagai pemberontakan, prinsip persatuan dan kesatuan Pancasila harus dijaga. Ini menunjukkan bahwa dalam filsafat Pancasila terdapat fungsi praktis, yang tercermin dalam peran Pancasila sebagai perekat bagi bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam teori pragmatik yang menyatakan bahwa nilai kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh kebermanfaatannya dalam kehidupan praktis (Bakry, 1994 hlm. 49). Para pengikut Pancasila meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila karena dianggap berfungsi secara fungsional dalam mempersatukan bangsa Indonesia (Budisutrisna, 2006 hlm. 69).

Pancasila dianggap sebagai dasar persatuan dan kesatuan yang telah mencakup konsep persatuan dan kesatuan dalam esensinya. Pancasila dapat membuktikan kegunaannya sebagai awal filosofi negara juga dasar bagi negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana diuraikan oleh Notonagoro dalam empat pertanyaan kausalitas Aristoteles. Dari perspektif historis, Pancasila memandang pernyataan yang koheren, sesuai dengan kenyataan, dan membawa manfaat sebagai dasar negara Indonesia, mengikuti prinsip koherensi, korespondensi, dan pragmatik secara hierarkis-piramidal dan saling melengkapi (Budisutrisna, 2006 hlm. 39).

#### **b. Monodualisme Pancasila**

Monodualis, menurut Notonegoro (1975 hlm. 124), Dengan melihat pada kesatuan unsur manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat, dikenal sebagai monodualis. Pemahaman monodualistik bangsa Indonesia, menurut (Kaelan, 2018 hlm. 211), menempatkan segala hal dalam dua komponen yang saling terkait dan menyatu menjadi satu. Konsep monodualistik ini dianggap

sebagai sebuah aksioma yang digunakan dalam memberikan makna terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan monodualistik ini digunakan untuk memberikan makna terhadap hakikat manusia, hakikat kehidupan, dan sebagainya (Soeprapto, 1996 hlm. 3).

Dalam usaha memahami kebenaran tentang hakikat atau jati diri manusia, pandangan monodualistik ini diterapkan. Manusia terdiri dari dua unsur yang masing-masing diakui keberadaannya, dan keduanya saling terikat sebagai satu kesatuan (Kaelan, 2018 hlm. 88). Kehilangan salah satu unsur akan menyebabkan hilangnya eksistensi manusia itu sendiri. Demikian juga, dalam pandangan terhadap masyarakat, bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari individu-individu yang membentuknya. Individu dan masyarakat adalah dua unsur yang membentuk suatu kesatuan. Individu diakui keberadaannya, martabatnya, dan nilai-nilainya, tetapi masyarakat juga memiliki eksistensi (Soeprapto, 1996 hlm. 3).

Hubungan antara masyarakat dan individu adalah dua unsur yang saling terkait menjadi satu (Notonagoro, 1975 hlm. 23). Individu saja tidak akan membentuk masyarakat, begitu juga masyarakat tidak akan ada tanpa adanya individu. Dengan mengacu pada prinsip monodualis, falsafah Pancasila mengakui adanya hubungan antara keduanya yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang terikat oleh hukum sebab-akibat. Sebagai konsekuensi dari penerapan monodualisme, terutama dalam memahami pengertian dan konsep nilai, bahwa realitas kehidupan menghadirkan kontras antara benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek, serta antara keadilan dan kezaliman (Soeprapto, 1996 hlm. 3).

Nilai-nilai ini selalu bersamaan, menurut (Kaelan, 2018 hlm. 88), dan dalam buku Filsafat Pancasila, nilai-nilai ini terwujud dalam kehidupan nyata; keadilan dan ketidakadilan selalu bersama-sama terjadi di mana saja, kapan saja. Dengan pandangan ini, tidak perlu terlalu khawatir jika masih terjadi hal-hal yang salah, buruk, jelek, zalim, dan sebagainya, karena selain hal tersebut, terdapat pula hal-hal yang bertentangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hubungan kehidupan sehari-hari tidak selalu melibatkan hanya dua unsur, tetapi kadang-kadang melibatkan banyak unsur. Salah satu contoh adalah pembentukan negara bangsa, yang tidak hanya terdiri dari dua unsur tetapi melibatkan banyak komponen, sehingga muncullah gagasan monopluralistik. Semboyan Bhinneka

Tunggal Ika mencerminkan realisasi konsep monopluralistik ini. Monodualisme dalam Pancasila dijelaskan sebagai hakikat bahwa unsur-unsur terikat menjadi satu kesatuan (Soeprapto, 1996 hlm. 3).

### **c. Nilai-Nilai Dalam Pancasila**

Nilai-nilai dalam Pancasila Dikutip Tahun 2003 berdasarkan (Tap MPR No. I/MPR/2003) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima nilai dasar, yang menunjukkan bahwa Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia, (Juniarti et al., 2021 hlm. 19) yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai landasan segala nilai dan norma. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan agama di Indonesia.

Sila pertama dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa".

- (a) Mengakui bahwa Tuhan ada : Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
- (b) Kebhinekaan Agama: Menghargai keberagaman agama dan keyakinan di dalam masyarakat Indonesia. Tidak ada satu agama yang diutamakan atau diwajibkan.
- (c) Kebebasan Beragama: Menjamin kebebasan individu untuk memilih, mengamalkan, dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (d) Toleransi Antarumat Beragama: Mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.
- (e) Pelembagaan Nilai-Nilai Keagamaan: Nilai-nilai keagamaan diakui dan dihormati dalam norma-norma sosial dan hukum, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila.
- (f) Ketertiban Moral dan Spiritual: Mendorong terciptanya ketertiban moral dan spiritual dalam masyarakat, dengan mengedepankan norma-norma keagamaan.

- (g) Tidak Memaksa Agama Tertentu: Menegaskan bahwa negara tidak boleh memaksa atau memberikan tekanan kepada warganya untuk mengikuti agama tertentu.
- (h) Keberagaman dalam Kehidupan Sosial: Menekankan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis meskipun memiliki perbedaan agama.
- (i) Pentingnya Spiritualitas dalam Kepemimpinan: Mendorong para pemimpin untuk memandang kepemimpinan mereka sebagai amanah spiritual, bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat.
- (j) Pemeliharaan Keharmonisan Antarumat Beragama: Mendorong usaha pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keharmonisan antarumat beragama guna menciptakan kedamaian dan persatuan nasional.

Sila pertama ini menciptakan landasan untuk kebebasan beragama, toleransi, dan kehidupan berdampingan harmonis dalam keragaman agama di Indonesia (Sudirman & Sarjito, 2021 hlm. 31)

2.) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan keadaban dalam pergaulan masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan martabat yang harus dihormati.

Sila kedua dalam Pancasila adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

- (a) Hak Asasi Manusia: Mengakui bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan bagi semua orang, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kehormatan.
- (b) Keadilan Sosial: Menggarisbawahi urgensi keadilan sosial dalam komunitas, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.
- (c) Kedudukan dan Martabat Manusia: Mengungkapkan bahwa semua individu memiliki posisi dan nilai yang setara di mata hukum dan masyarakat.
- (d) Penghapusan Diskriminasi: Menolak semua jenis perlakuan tidak adil berdasarkan etnis, kepercayaan, keturunan, dan status sosial, serta mengupayakan pembangunan masyarakat yang mengakomodasi semua orang.

- (e) Perlindungan Anak dan Perempuan: Menjamin perlindungan khusus bagi anak-anak dan perempuan, serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap mereka.
- (f) Pembangunan Berkelanjutan: Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
- (g) Pendidikan untuk Semua: Menggarisbawahi betapa pentingnya pendidikan yang merata dan bermutu, sehingga setiap individu dalam negara memiliki kesempatan yang setara untuk menggali potensi mereka sendiri.
- (h) Kesejahteraan Sosial: Menetapkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, dengan fokus terutama pada individu yang mengalami ketidakuntungan secara ekonomi dan sosial.
- (i) Solidaritas dan Gotong Royong: Mendorong timbulnya semangat kesatuan dan kerjasama di tengah masyarakat, di mana setiap orang saling memberi dukungan dan bantuan kepada sesamanya.
- (j) Pengembangan Budaya dan Adab Manusia: Menggalakkan perkembangan norma-norma budaya dan etika manusia yang bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, sopan santun, dan saling menghargai.

Sila kedua ini membentuk dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan berperadaban, di mana semua orang dapat hidup dengan harga diri dan kebahagiaan yang sama (Juniarti et al., 2021 hlm. 33).

3) Persatuan Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Semua warga negara Indonesia diharapkan bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Sila ketiga dalam Pancasila adalah "Persatuan Indonesia".

- (a) Keutuhan dan Kesatuan NKRI: Menggarisbawahi betapa esensialnya kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (b) Tidak Ada Pemisahan Wilayah: Menolak segala bentuk pemisahan wilayah yang dapat merugikan integritas dan persatuan bangsa Indonesia.

- (c) Kesetaraan Daerah: Mendorong kesetaraan antar daerah dalam hal pembangunan dan pemanfaatan sumber daya, sehingga tidak ada daerah yang terpinggirkan.
- (d) Penerimaan Keberagaman: Menerima dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia.
- (e) Bahasa sebagai Perekat Bangsa: Mengembangkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa dan alat komunikasi yang efisien.
- (f) Penghormatan terhadap Adat Istiadat: Menghormati dan melestarikan adat istiadat serta tradisi masyarakat daerah, sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.
- (g) Penguatan Bhinneka Tunggal Ika: Mengedepankan semangat "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda namun tetap satu) sebagai landasan persatuan dalam keberagaman.
- (h) Toleransi Antarbudaya: Mendorong terciptanya toleransi antarbudaya, di mana setiap kelompok etnis atau budaya dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik.
- (i) Partisipasi dalam Pembangunan: Mendorong partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia dalam proses pembangunan, sehingga setiap warga merasakan manfaat pembangunan secara merata.
- (j) Pancasila sebagai Pemersatu: Menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar sebuah ideologi dan filsafat, melainkan juga pondasi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap individu memiliki identitas yang seragam.

Sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, serta menciptakan dasar bagi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022 hlm. 35).

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Nilai ini menekankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan diatur berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sila keempat dalam Pancasila adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

- (a) Demokrasi dan Keterlibatan Rakyat: Menekankan prinsip demokrasi, di mana kebijaksanaan dan keputusan politik diambil melalui perwakilan rakyat atau permusyawaratan.
- (b) Keseimbangan Antara Otoritas dan Partisipasi Rakyat: Menyuarakan perlunya keseimbangan antara otoritas pemerintah dan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan.
- (c) Pemerintahan yang Bersih dan Transparan: Mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
- (d) Keadilan Sosial dan Ekonomi: Menekankan perlunya kebijakan yang mengarah pada keadilan sosial dan ekonomi, sehingga setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.
- (e) Perlindungan Hak Minoritas: Menjamin perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok yang mungkin berada dalam posisi kurang beruntung atau terpinggirkan.
- (f) Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan: Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam segala aspek pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
- (g) Pengembangan Pendidikan Politik: Menggalakkan pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dan cerdas dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- (h) Keseimbangan Antara Sentralisasi dan Desentralisasi: Mencari titik tengah antara sentralisasi serta desentralisasi kebijakan guna menjamin partisipasi dan kesejahteraan yang merata di semua bagian Indonesia.
- (i) Konsultasi Publik: Mendorong praktik konsultasi publik dan dialog terbuka sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili.
- (j) Kemajuan dan Inovasi: Mendorong kemajuan dan inovasi dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan.

Sila keempat ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif rakyat, dan pembangunan yang merata untuk mencapai kesejahteraan bersama (Yusdiyanto, 2017 hlm. 37).

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya distribusi keadilan sosial dan keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Semua warga negara memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Sila kelima dalam Pancasila adalah "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Berikut adalah 10 poin nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima secara lengkap dan detail:

- (a) Distribusi Kekayaan yang Adil: Mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang signifikan.
- (b) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan manfaat dari kemajuan yang dicapai.
- (c) Perlindungan bagi Kaum Dhuafa: Menjamin perlindungan bagi kaum dhuafa, yatim piatu, dan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung.
- (d) Akses Kesehatan dan Pendidikan: Menciptakan akses yang merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak dasar tersebut.
- (e) Upaya Pengentasan Kemiskinan: Mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, sehingga setiap warga dapat memiliki standar hidup yang layak.
- (f) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Menyoroti urgensi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, supaya manfaatnya bisa dinikmati oleh generasi masa kini dan mendatang.
- (g) Keadilan Gender: Mendorong terciptanya keadilan gender, di mana hak-hak perempuan dan laki-laki diakui dan dilindungi secara adil.



- (h) Perlawanan Terhadap Korupsi: Menolak segala bentuk korupsi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola yang bersih.
- (i) Perlindungan Lingkungan: Menjunjung tinggi nilai keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
- (j) Solidaritas Sosial: Mendorong terciptanya solidaritas sosial di antara seluruh warga negara, sehingga rasa saling peduli dan tolong-menolong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sila kelima ini menegaskan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan sosial, serta memberdayakan setiap warga negara Indonesia untuk meraih kesejahteraan bersama (Sari & Najicha, 2022 hlm. 39).

Menurut (Cep Miftah Khoerudin et al., 2021 hlm. 6) dalam Jurnal yang berjudul *Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, pada jurnal tersebut terdapat kalimat Pancasila merupakan multidisiplin ilmu yang mana didalamnya terdapat hukum, politik, nilai moral, dan kewarganegaraan.

Menurut (Cahyono et al., 2022 hlm. 2) setiap warga Indonesia memiliki tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran penuh. Hal ini karena Pancasila, sebagai dasar negara, mengandung nilai-nilai luhur yang tercermin dalam setiap silanya. Nilai-nilai ini unik dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan bagi semua peraturan, baik yang formal maupun informal.

#### **4. Ruang Lingkup Masyarakat**

##### **a. Definisi Masyarakat**

Masyarakat dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai *society* yang dalam bahasa Latin dimaknai pula sebagai *socius* atau kawan. Definisi “masyarakat” sangat beragam, (Handoyo, 2015 hlm. 1) menyatakan bahwa masyarakat yakni kesatuan tetap dari orang-orang yang tinggal di suatu daerah. Namun pada masyarakat sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab *syakara* yakni yang artinya adalah ikut serta atau berpartisipasi (Saripa; Faradiza; Heni, 2023 hlm. 48).

Dalam (Handoyo, 2015 hlm. 2) dengan demikian seluruh masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok individu yang saling berbaur atau secara ilmiah, saling berinteraksi dengan satu sama lain, Pengertian masyarakat yakni sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dan telah berhubungan satu sama lainnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan sebagaimana menurut (Phil Astrid S. Susanto, 1999 hlm. 12).

Sejalan dengan hal tersebut (Handoyo, 2015 hlm. 3) asyarakat terbentuk dari individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu dengan keterkaitan, langsung maupun tidak langsung. Mereka terhubung oleh solidaritas melalui latar belakang bersama dalam sejarah, politik, budaya (Dannerius Sinaga, 1988 hlm. 12).

Masyarakat dimaknai sebagai bentuk kumpulan manusia yang menjalin hubungan baik secara individu maupun kelompok demi mencapai kepentingan bersama atau yang bertentangan dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang juga dikenal sebagai bentuk kepentingan umum dan tersembunyi (Soleman B. Taneko, 1984 hlm. 31).

Menurut Handoyo (2015 hlm. 4), masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan yang dihuni oleh manusia yang terikat oleh norma dan tradisi tertentu yang bersifat sosial. Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Arab "musyarakat", secara harfiah artinya "semua bersama-sama". Secara evolusi, istilah ini berubah menjadi "masyarakat" yang mengindikasikan tentang hidup bersama, interaksi, dan keterkaitan antara individu-individu yang membentuknya, yang pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah komunitas. Masyarakat juga dapat dibagi menjadi berbagai bentuk tingkatan atau strata sosial, seperti kelas sosial, lapisan pendidikan, atau perbedaan ekonomi (Usamah, 2018 hlm. 61).

Struktur sosial dalam kerangka individual dapat menggambarkan kaitan unsur dalam masyarakat (Handoyo, 2015 hlm. 5). Masyarakat juga dapat memiliki sebuah institusi sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, seperti pemerintahan, keluarga, pendidikan, dan agama. Institusi ini memberikan kerangka kerja dan bentuk aturan-aturan yang membantu masyarakat dalam memenuhi sebuah kebutuhan mereka dan memperkuat hubungan sosial. Masyarakat pun diartikan yakni sekumpulan individu yang saling berinteraksi,

memiliki budaya, nilai, dan norma yang sama, serta tergantung antara satu sama lain dalam membentuk suatu kelompok komunitas (Kontjaraningrat, 1969 hlm. 4).

Dari berbagai definisi tersebut, (Handoyo, 2015 hlm. 6) masyarakat adalah kelompok individu saling berinteraksi dan saling bergantung membentuk komunitas. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial seperti elemen keluarga, teman, sekolah, agama, atau organisasi. Masyarakat memiliki aspek budaya, nilai, norma, dan aturan yang membentuk tata kelola sosial dan tata cara hidup yang diterima dan dijalankan oleh anggotanya. Budaya masyarakat mencakup bahasa, adat istiadat, kesenian, agama, dan pola pikir yang telah mempengaruhi cara individu dalam masyarakat memandang dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari (Elly Setiadi, 2006 hlm. 9).

## **b. Jenis - Jenis Masyarakat**

### **1) Masyarakat Modern**

Masyarakat modern (Handoyo, 2015 hlm. 20) merujuk pada suatu entitas sosial yang mengalami pertumbuhan pesat dalam aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Ciri-ciri masyarakat modern meliputi kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, Pendidikan, sekularisme, mobilitas sosial, dan pengaruh globalisasi. Menurut pandangan Amiruddin, masyarakat modern bisa diartikan sebagai masyarakat yang telah melepaskan diri dari norma-norma tradisional yang dapat menghambat kemajuan, sehingga memungkinkan lahirnya ide-ide baru. Dalam konteks hukum, masyarakat modern ditandai oleh adanya solidaritas sosial yang terorganisir, yang muncul karena adanya ketergantungan fungsional antarindividu dalam suatu kelompok masyarakat (Dannerius Sinaga, 1988 hlm. 13).

Salah satu karakteristik utama masyarakat modern adalah dampak globalisasi, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemakmuran (Handoyo, 2015 hlm. 20). Hal ini didukung oleh sistem ekonomi kapitalisme yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis. Masyarakat modern juga menonjolkan Pendidikan, di mana individu memiliki fokus pada kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi dan meraih kesuksesan. Keberadaan sekularisme menjadi ciri penting dalam masyarakat modern, mengacu pada pemisahan agama dari urusan negara, serta kebebasan

individu untuk menjalani keyakinan dan praktik agama sesuai dengan pilihannya (M Ngafifi, 2014 hlm. 36).

Diversitas budaya dan pengakuan terhadap hak asasi manusia juga menjadi nilai penting dalam masyarakat modern. Mobilitas sosial, sebagai karakteristik lainnya, menunjukkan kemungkinan seseorang untuk naik atau turun dalam hierarki sosial melalui Pendidikan dan peluang pekerjaan. Terakhir, globalisasi berdampak pada masyarakat modern dengan mempercepat pertukaran informasi, komunikasi, dan perdagangan internasional, membawa pengaruh budaya dan nilai-nilai dari berbagai negara ke dalam masyarakat modern (Andi, 2019 hlm. 35).

## **2) Masyarakat Tradisional**

Kata "tradisional" berasal dari kata "tradisi" atau "*traditum*", yang merujuk pada hal-hal yang diwarisi atau diteruskan dari masa lampau hingga saat ini (Handoyo, 2015 hlm. 44). Masyarakat tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang menjalani kehidupan sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat yang telah diterapkan oleh generasi sebelumnya selama bertahun-tahun. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar dan dipengaruhi oleh kepercayaan lokal yang berkembang di dalam komunitas mereka. Pola hidup masyarakat tradisional cenderung mengikuti tata cara khas, seperti sistem pertanian subsisten, pembagian peran berdasarkan gender dan usia, serta penganut sistem nilai yang mementingkan kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Struktur sosial dalam masyarakat tradisional biasanya sangat kuat dan hierarkis, di mana peran dan status seseorang ditentukan oleh faktor-faktor seperti umur, gender, dan silsilah. Oleh karena itu, masyarakat tradisional umumnya menghargai kesetaraan dan keterlibatan setiap anggota dalam kehidupan sosial mereka (Emy dan Mira, 2016 hlm. 12).

Menurut definisi Koentjaraningrat dalam (Handoyo, 2015 hlm. 2) sebagai mana dikutip oleh (Sudikan, 2001 hlm. 6) desa dapat diartikan sebagai suatu komunitas kecil yang memiliki keberadaan tetap di suatu lokasi tertentu. Masyarakat desa memiliki ciri khas tertentu, sebagaimana diuraikan dalam Jefta oleh (Roucek dan Warren, 1995 hlm. 8), yang mencakup aspek-aspek berikut:

- (1) Peran kelompok primer memiliki tingkat penting yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat desa.

- (2) Faktor geografis memainkan peran penting dalam membentuk kelompok atau asosiasi di desa.
- (3) Hubungan antarindividu cenderung lebih akrab dan langgeng dalam masyarakat desa.
- (4) Masyarakat desa memiliki kecenderungan untuk bersifat homogen dalam hal identitas dan latar belakang budaya.
- (5) Keluarga dianggap sebagai unit ekonomi yang memiliki peran yang ditekankan dalam struktur masyarakat desa.
- (6) Proporsi populasi anak-anak biasanya lebih besar dalam masyarakat desa.
- (7) Tujuan hidup bersama dalam masyarakat desa adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama dan membangun kehidupan yang harmonis di antara anggota masyarakat (Handoyo, 2015 hlm. 6).

Dapat diartikan bahwa karakteristik masyarakat desa atau dipedesaan jelas berbanding terbalik atau tidak sama dengan masyarakat perkotaan (Roucek dan Warren dalam Jefta, 1995 hlm. 8).

Menurut Sari (2016, hlm 1), tipologi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional memiliki solidaritas yang tinggi, yang didasarkan pada hubungan antarindividu yang bersifat kolektif atau bersama-sama. Di sisi lain, masyarakat modern memiliki solidaritas yang rendah, yang lebih didasarkan pada kepentingan individu masing-masing. Tipologi masyarakat desa dapat dipahami melalui faktor-faktor seperti *tradition, belief, leadership, and social solidarity*, seperti yang disajikan oleh Weber (2006). Masyarakat desa yang mengikuti tradisi dan kepercayaan serta memegang teguh norma-norma yang telah ada sejak masa lalu dapat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Sementara itu, masyarakat yang lebih cenderung mengikuti logika rasionalitas hukum dan terlibat dalam tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional, cenderung dikategorikan sebagai masyarakat yang lebih modern. Tipologi masyarakat ini dapat berubah seiring dengan perkembangan karakteristik masyarakat dan kebudayaan di dalamnya, dengan masyarakat desa yang awalnya tradisional kemudian menuju orientasi yang lebih modern. Dalam skala Tipologi masyarakat Desa Kampung Adat Banceuy terdapat 3 Jenis Tipologi yang pertama *Konservatif* atau masyarakat adat yang tetap teguh mempertahankan

tradisi ruwatan bumi dan dengan segala mindset yang kental budaya, mempertahankan tradisi, keadaan, kebiasaan dan adat yang berlaku. Kemudian ada masyarakat yang *Partisipatif Netralisme* yang akan mengikuti bagaimanapun ketentuan adat desa dibuat atau ketentuan wilayah yang mereka tinggali, ketiga ada masyarakat *progresif* bertujuan menuju kemajuan dan perbaikan dari kondisi sebelumnya. (Sari, 2016 hlm 1) dengan adanya ketiga tipologi masyarakat ini di Kampung Adat Banceuy membuat tradisi dan adat dikampung adat banceuy memiliki unsur yang mengalami evaluasi *culture* namun bukan ke arah untuk penghapusan atau kepunahan budaya namun untuk mengikuti gagasan yang masyarakat sana miliki tanpa menghancurkan nilai budaya atau tradisi yang terkandung pada ruwatan bumi maka dari itu pada setiap prosesi tradisi, ruwatan bumi khususnya telah mengalami evaluasi yang semakin mengandung nilai-nilai keislaman dikarenakan perbaikan tradisi ini bertujuan agar tidak mengandung unsur yang bertolak belakang dengan ajaran agama islam karena mayoritas masyarakat Adat Banceuy Subang secara keseluruhan beragama Islam (Sari, 2016 hlm 1).

## **5. Teori Tradisi dan Kebudayaan**

### **a. Pengertian Tradisi**

Menurut Putri (2021, hlm. 8) dalam bukunya "Tradisi Filosofi dan Beberapa Problem Keagamaan", tradisi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan atau adat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang dan berupa peraturan yang diikuti oleh masyarakat. Menurut Soekanto Soerjono (1987, hlm. 9), tradisi adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam pola yang sama. Adh Putra (2018, hlm. 51) tradisi adalah praktik yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan juga dipandang sebagai kebiasaan. Piotr Sztompka, seperti yang disebutkan dalam penelitian Ainur (2019, hlm. 97), mendefinisikan tradisi sebagai kumpulan gagasan, materi, dan benda dari masa lalu yang masih ada dan dilestarikan dalam kehidupan sekarang. Tradisi melibatkan kontinuitas budaya dalam bentuk sikap sosial, adat istiadat, dan institusi, serta menciptakan kebiasaan dan praktik yang telah berlangsung lama.

Dalam bahasa Latin, konsep tradisi, seperti yang diungkapkan oleh Putri (2021, hlm. 9), berasal dari kata "*traditio*" yang secara harfiah berarti "diteruskan"

ini adalah kebiasaan lama yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini mewariskan informasi antar-generasi secara lisan atau tertulis, seperti yang dijelaskan oleh (Koentjaraningrat, 1984, hlm. 1). Tujuan utama dari tradisi dalam masyarakat adalah untuk memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai bersejarah dilestarikan, serta untuk mempertahankan prinsip dalam kehidupan bermasyarakatnya. (Putri, 2021, hlm. 8) Menghormati, menghargai, dan menerapkan budaya dengan benar dianggap sebagai kunci untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai jalinan sosial antar masyarakat, yang perlu diselenggarakan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tradisi ini sering dianggap sebagai warisan nenek moyang dalam animisme dan dinamisme. Animisme melibatkan kepercayaan pada keberadaan kekuatan dalam unsur tertentu, dan sering kali di dalam ritualnya terdapat praktik memberikan persembahan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib (Ferial, 2019, hlm. 2).

Para leluhur meyakini adanya roh yang amat kuat dan memiliki kekuatan gaib yang melebihi manusia (Putri, 2021, hlm. 8). Untuk menghindari pengaruh roh tersebut, mereka melaksanakan upacara ritual dengan menyajikan persembahan atau sajian. Praktik ini mewarisi hubungan antara materi dan konsep dari masa lampau, dilestarikan hingga sekarang. Tradisi, atau yang dikenal sebagai *turats*, dijelaskan sebagai warisan yang murni berasal dari masa lampau dan tidak terlupakan. Tradisi ini berulang kali terjadi dan memiliki tujuan tertentu, seperti memohon berkat kepada Allah SWT untuk keamanan, kesejahteraan, kesehatan, ketenangan, dan sebagainya, seperti yang diutarakan oleh Hasan Hanafi (dalam Hakim, 2003, hlm. 9).

### **b. Fungsi Tradisi**

Dalam buku Tradisi dan Kebudayaan Nusantara (Qurtuby & Lattu, 2021 hlm. 18) pada tradisi berperan penting dalam menguatkan karya turun temurun nenek moyang yang diwariskan, karena didalam tradisi terkandung nilai moral, norma dan unsur keagamaan. Teori fungsionalisme struktural, yang dikembangkan oleh (Talcott Parsons, 1992), telah lama digunakan dalam pemahaman fungsi masyarakat. Fungsi diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan suatu sistem. Parsons menyusun empat syarat agar masyarakat dianggap

berfungsi, yang dikenal sebagai *AGIL*, singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L). *Adaptation* (adaptasi) menunjukkan bahwa masyarakat harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan sebaliknya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) menekankan bahwa sistem harus mampu merumuskan dan mencapai tujuannya. *Integration* (integrasi) mengacu pada kemampuan masyarakat mengatur hubungan antarkomponennya. *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) dan tentu mencakup kemampuan masyarakat mempertahankan, memperbaiki, dalam perubahan motivasi individu dan budaya yang mendukungnya (Fawaa, 2022 hlm. 25).

Masyarakat, sebagai sistem terdiri dari komponen saling terhubung, bergantung satu sama lain, dan membentuk suatu keseluruhan, harus dilihat sebagai keseluruhan unsur yang berinteraksi (Qurtuby & Lattu, 2021, hlm. 18). Tradisi ritual, dalam hal ini, merupakan bagian integral dari masyarakat yang memberinya dukungan. Fungsi dari tradisi ritual adalah untuk menjaga kehidupan sosial dan memenuhi kebutuhan dalam memelihara solidaritas sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks dinamika sosial dan budaya yang dianggap sebagai dinamis, peran tradisi bisa dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1990, hlm. 44).

### **c. Pengertian Kebudayaan**

Kebudayaan dalam buku Ilmu Budaya Dasar menurut (Kurniawan, 2014 hlm. 2) merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terdapat adat istiadat, moral, kesenian, pengetahuan, kepercayaan, hukum dan kemampuan yang didapat masyarakat. Kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah* yang berarti *buddhi* (budi atau akal) merujuk pada sistem pemikiran, ide, perilaku, tindakan, dan karya yang manusia ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan cara belajar. Kebudayaan melibatkan elemen penting seperti *the value system, which is dynamic and constitutes a learning element, encompasses assumptions, agreements, beliefs, and rules*, yang memungkinkan interaksi antar anggota kelompok (Argyo, 2008 hlm. 5).

Menurut (Suparlan, 2003 hlm. 29) Budaya merupakan panduan dalam memenuhi keperluan adab, yang meliputi segala pengetahuan yang dimiliki oleh



manusia sebagai entitas sosial. Kebudayaan mencakup seluruh pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk memahami dan menafsirkan lingkungan, serta mendorong tindakan yang dianggap perlu. Kebudayaan mencakup cara hidup dan pemikiran kelompok masyarakat, termasuk sistem nilai, norma, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan institusi sosial. (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam Kurniawan, 2014 hlm. 3) Kebudayaan dapat dianggap sebagai hasil karya, rasa, cipta masyarakat, interaksi antara manusia dan lingkungan sosial-budaya di sekitarnya. Kebudayaan mencerminkan identitas dan jati diri kelompok masyarakat, membentuk pandangan dunia, dan memengaruhi perilaku individu dalam kelompok tersebut sejalan dari pendapat Taylor (Horton & Chester, 1996 hlm. 61). Kebudayaan, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, sistem hukum, kebiasaan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok manusia juga terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, lingkungan, dan dinamika sosial. Sifat kebudayaan yang dinamis memungkinkannya untuk terus berubah dan berkembang seiring dengan waktu dan perubahan dalam aspek sosial-budaya di sekitarnya. Faktor seperti teknologi dan globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan suatu kelompok masyarakat. A. L. Kroeber melihat sifat kebudayaan sebagai super organik, melebihi manusia atau organik. Kebudayaan memiliki peranan penting yang mempengaruhi cara pandang, perilaku, dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial-budaya. Pemahaman yang baik tentang kebudayaan diperlukan untuk menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat lainnya dan sebagai alat konseptual untuk analisis dan penafsiran (E.B. Tylor, 1871 hlm. 58 dalam Kurniawan, 2014 hlm 2).

Kebudayaan menjadi alat penting untuk memahami dan mendukung eksistensi masyarakat, membentuk sistem yang hadir dalam budaya sebagai hasil aktivitas masyarakat dalam pembelajaran, baik formal maupun informal. Kebudayaan tidak muncul secara spontan, melibatkan intervensi manusia dalam prosesnya (Januati & Miharja, 2019 hlm. 183). Kebudayaan tidak selalu dihayati dengan preferensi yang serupa, dan perbedaan ini melibatkan variasi dalam penekanan suara, logika konseptual, serta minat dan kepentingan individu..

#### **d. Unsur-Unsur Kebudayaan**

Menurut (Kurniawan, 2014 hlm. 10) kebudayaan mencakup semua sistem pemikiran, ide, perilaku, tindakan, karya yang dibuat oleh manusia sebagai respons terhadap kebutuhan hidup dalam lingkungan sosial, dihasilkan melalui proses pembelajaran. Dalam pandangan tersebut, terdapat tujuh unsur budaya yang mencakup, antara lain (Sabilla, 2022 hlm. 12) :

##### **1) Sistem Bahasa**

Bahasa diartikan sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. (Kurniawan, 2014 hlm. 6) Dalam lingkup antropologi, istilah yang digunakan untuk merujuk pada bahasa adalah linguistik. Dalam konteks kebudayaan, bahasa menjadi sarana bagi manusia untuk memahami budaya secara simbolik, yang kemudian pemahaman tersebut dapat diwariskan kepada generasi penerus. Menurut Koentjaraningrat, bahasa dalam praktik kehidupan manusia dapat berupa ekspresi lisan atau tulisan yang digunakan sebagai alat komunikasi (Sabilla, 2022 hlm. 12).

Menurut (Kania, 2018 hlm. 1) suku sunda yakni etnis kelompok yang berasal dari bagian barat pulau jawa di Indonesia jati diri yang dipunyai dan mempersatukan orang Sunda yakni bahasanya dan budayanya, maka simpulannya suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa di Indonesia, yang identitas dan persatuannya didasarkan pada bahasa serta budayanya.

##### **2) Sistem Pengetahuan**

Pengetahuan dalam konteks budaya memiliki cakupan yang sangat luas karena melibatkan pemahaman terhadap manusia dan berbagai unsur kehidupan manusia (J.J Hoenigman dalam Kurniawan, 2014 hlm. 4). Namun, dalam bidang antropologi, konsep pengetahuan lebih difokuskan pada cara manusia berpikir untuk mempertahankan suatu budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh, pengetahuan astronomi digunakan untuk mengukur posisi bulan dan benda langit lainnya, yang diyakini memiliki makna terhadap sistem keberlanjutan kehidupan manusia (Sabilla, 2022 hlm. 12).

### **3) Sistem Masyarakat**

Tatanan sosial dalam budaya disusun dan digunakan untuk memahami bagaimana manusia ada dalam membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial (Kurniawan, 2014 hlm. 113). Dalam kelompok sosial ini, terdapat aturan-aturan yang diatur oleh adat istiadat. Fondasi utama dari kesatuan ini adalah hubungan kekerabatan, yang melibatkan keluarga inti dan kerabat lainnya (Sabilla, 2022 hlm. 12).

Menurut (Asep Deni Normansyah et al., 2022) bahwa komunikasi dan sosial adalah kebutuhan dasar manusia, kalimat tersebut menyatakan bahwa komunikasi dan interaksi sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Ini berarti bahwa manusia secara alami memerlukan komunikasi dan hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan bahkan fisik mereka. Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi, pemahaman, dan dukungan antara individu, sementara interaksi sosial membantu membangun hubungan yang mendukung dan komunitas yang harmonis. Tanpa kedua elemen ini, manusia mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, dan mengalami berbagai masalah kesehatan mental.

### **4) Sistem Teknologi**

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dalam buku Ilmu Budaya dasar menyatakan waktu merubah zaman yang terjadilah perubahan yang konstan (Kurniawan, 2014 hlm. 107). Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, manusia terus berusaha menciptakan berbagai benda dan peralatan. Dalam konteks kehidupan budaya, teknologi dapat diartikan sebagai ragam peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam isi buku Ilmu Budaya Dasar (Kurniawan, 2014 hlm. 71) Ponsel juga merupakan teknologi budaya dan budaya teknologi. Pandangan Koentjaraningrat menunjukkan bahwa masyarakat lokal yang hidup secara nomaden memiliki delapan kategori alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun tidak terbatas pada, peralatan produktif, senjata, peralatan pembuat api, makanan, pakaian, rumah, dan alat transportasi (Sabilla, 2022 hlm. 12).

## **5) Sistem Pencaharian**

Mata pencaharian menjadi titik fokus utama dalam studi etnografi, yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka (Kurniawan, 2014 hlm. 7). Kuliner dan Pariwisata sangat penting dalam aspek ini. Etnografi mendalam mengkaji berbagai sistem pencaharian yang umumnya dominan dalam masyarakat tradisional (Kurniawan, 2014 hlm. 98). Beberapa sistem pencaharian yang sering ditemui atau mendominasi termasuk:

- (a) Menyusuri hutan untuk mencari hewan dan tumbuhan.
- (b) Mengelola ternak untuk mendapatkan keuntungan.
- (c) Bertani untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- (d) Teknik menangkap ikan secara tradisional.
- (e) embangun sistem irigasi untuk pertanian yang berkelanjutan.

Lima metode penghidupan itu adalah praktik-praktik lama yang umum dilakukan oleh komunitas tradisional (Sabilla, 2022 hlm. 12).

## **6) Sistem Agama**

Koentjaraningrat dalam (Kuniawan, 2014 hlm. 116) menyatakan bahwa munculnya isu agama disebabkan oleh pertanyaan mengenai alasan mengapa manusia perlu meyakini keberadaan satu Dzat yang gaib atau bersifat supranatural sebagai entitas yang paling tinggi di antara banyak manusia. Pendekatan antropologi dalam memahami unsur agama sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat adalah dengan melihat aspek beragama, yang mencakup perasaan internal individu sebagai upaya untuk menjalankan kehidupan yang memiliki dimensi keagamaan (Sabilla, 2022 hlm. 12).

## **7) Sistem Kesenian**

Penelitian dalam bidang antropologi (Kuniawan, 2014 hlm. 114) menyatakan yang mengeksplorasi seni dimulai sejak era etnografi yang memfokuskan pada beragam kegiatan seni dalam masyarakat tradisional. Sementara itu, nilai kebudayaan, yang mencakup prinsip-prinsip abstrak, dianggap sebagai elemen krusial dalam kelangsungan hidup manusia. Koentjaraningrat menekankan bahwa nilai-nilai ini tumbuh melalui proses sosialisasi, baik secara lisan maupun non-verbal, dan menjadi dasar bagi kesepakatan dalam masyarakat (Sabilla, 2022 hlm. 12).

Unsur-unsur kebudayaan melibatkan aspek-aspek kehidupan manusia dalam suatu kelompok masyarakat (Kurniawan, 2014 hlm. 3). Beberapa unsur kebudayaan yang diakui oleh para ahli meliputi:

- (a) Nilai: Prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh kelompok masyarakat, melibatkan aspek moral, religius, atau sosial, dan berfungsi sebagai panduan dalam tindakan sehari-hari.
- (b) Norma: Aturan atau tata cara yang diakui oleh kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya, dapat berupa aturan formal maupun norma informal seperti adat-istiadat.
- (c) Bahasa: Sistem komunikasi yang menjadi alat interaksi antarindividu atau kelompok, mempengaruhi pandangan, perilaku, dan pola pikir masyarakat.
- (d) Teknologi: Pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan barang atau jasa yang memengaruhi cara hidup dan interaksi anggota masyarakat.
- (e) Kesenian: Ekspresi kreatif melalui seni rupa, musik, tari, dan drama, menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu kelompok masyarakat.
- (f) Agama: Keyakinan dan praktik keagamaan yang memengaruhi pandangan dan perilaku, serta berperan dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat.
- (g) Institusi sosial: Lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah, membantu mengatur kehidupan sosial dan budaya dalam kelompok masyarakat.

Unsur-unsur ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk keunikannya dan kompleksitas budaya dalam suatu kelompok masyarakat (Sabilla, 2022 hlm. 12).

## **6. Keterkaitan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Pada Budaya Ruwatan Bumi Kampung Adat Banceuy Subang.**

### **a. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dikutip Tahun 2003 berdasarkan (Tap MPR No. I/MPR/2003)

- 1) Rakyat Indonesia telah menegaskan iman dan pengabdian mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu.

- 2) Rakyat Indonesia memiliki keyakinan untuk mematuhi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka, dengan dasar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mencerminkan penghargaan negara terhadap hak asasi manusia.
- 3) Mendorong terciptanya sikap saling menghargai dan bekerjasama di antara individu yang menganut berbagai agama dan kepercayaan terhadap satu Tuhan. Tetap menjunjung nilai toleransi tanpa adanya perlakuan diskriminatif, serta menjalankan tanggung jawab dengan profesionalisme sebagai prinsip utama.
- 4) Mendorong kehidupan yang damai antara individu yang beragama dan memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengurangi pertentangan, menyejukkan suasana, dan mencegah konflik.
- 5) Agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang bersifat personal bagi manusia dalam kaitannya dengan Sang Pencipta. Tidak perlu ikut campur atau membahas keyakinan seseorang, serta menjaga privasi agama yang dipeluk oleh setiap individu.
- 6) Menggalakkan pertumbuhan sikap menghargai kebebasan dalam melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan pribadi masing-masing.
- 7) Menghargai segala agama dan keyakinan yang dipeluk oleh seseorang, memberikan kebebasan untuk beribadah tanpa menyalahkan, serta mempertahankan sikap toleransi di tengah keberagaman keyakinan.
- 8) Tidak memaksa atau memberikan tekanan terhadap individu untuk mengikuti suatu agama atau kepercayaan tertentu, dan tetap menjaga sikap saling menghormati terhadap perbedaan keyakinan.

Hal ini dinyatakan pada Berdasarkan (Tap MPR No. I/MPR/2003) & (Syamsudin, 2009 hlm. 49).

## **b. Budaya Ruwatan Bumi Kampung Adat Banceuy**

### **1) Pengertian Ruwatan Bumi**

Ruwatan adalah ritual yang dimaksudkan untuk menghapus efek negatif seperti nasib buruk dan menjauhkan segala potensi kejadian tidak menyenangkan. Tujuan dari ruwatan bumi bervariasi tergantung pada konteksnya. (Pamungkas, 2008 hlm. 8) Ruwatan merupakan sebuah upacara yang bertujuan untuk membersihkan diri dari kesialan dan menjauhkan dari sifat-sifat jahat (Saleh Afif,

2020 hlm.44) . Kata "ruwat" berasal dari "ruwat" yang berarti bebas atau lepas. Proses "mangruwat" atau "ngruwat" diartikan sebagai pembebasan atau pelepasan (Pamungkas, 2008 hlm. 3). Dalam konteks tradisional, yang diruwat adalah makhluk hidup yang awalnya dianggap mulia atau bahagia, tetapi kemudian mengalami perubahan menjadi hina dan sengsara. Oleh karena itu, individu yang hidup dalam kondisi sengsara diwajibkan untuk menjalani ruwatan agar dapat dibebaskan atau dilepaskan dari kehidupan yang sulit. Ritual ruwatan anak sukerta melibatkan tradisi untuk membersihkan anak yang dianggap kotor atau membawa sial. Ruwatan ini merupakan tindakan untuk melepaskan anak dari pengaruh buruk yang diyakini melekat pada dirinya (Saleh Afif, 2020 hlm. 46). Khususnya, Ruwatan anak ontang-anting dianggap perlu sebagai upaya masyarakat untuk menghindari malapetaka yang diramalkan menyimpannya, menunjukkan nilai sakral yang diberikan pada ritual yang di laksanakan.

Dalam buku Tradisi Ruwatan, Kepercayaan umum di masyarakat Jawa adalah bahwa seseorang yang menjadi mangsa Batara Kala disebut sebagai orang sukerta (Pamungkas, 2008 hlm. 4). Orang sukerta ini dianggap akan mengalami nasib malang kecuali jika dia menjalani ruwatan dengan benar. Oleh karena itu, ruwatan dianggap sebagai upaya negosiasi atau cara untuk menjinakkan Batara Kala. Ruwatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti ruwatan Rasulan, ruwatan dengan pertunjukan wayang beber atau wayang kulit, ruwatan massal, dan ruwatan agung. Ruwatan Rasulan adalah ruwatan yang bersifat religius dan seringkali dilakukan oleh kalangan agamawan (Saleh Afif, 2020 hlm. 50). Ruwatan dengan pertunjukan wayang beber mengambil cerita dari Jaka Kembang Kuning atau dalang Kandabuwana. Wayang kulit, khususnya yang mengambil cerita dalang Kandabuwana, dianggap sebagai ruwatan yang paling populer dan sakral di kalangan masyarakat Jawa. Ruwatan massal seringkali memiliki unsur komersial, sementara ruwatan agung dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam jumlah besar dan dianggap lebih seremonial. Dari berbagai bentuk ruwatan tersebut, terlihat bahwa masyarakat Jawa memiliki banyak tradisi untuk membebaskan sukerta dari ancaman Batara Kala. Hal ini menunjukkan kompleksitas kepercayaan dan ritual yang terlibat dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan dan melindungi diri dari nasib buruk.

## **2) Tradisi Budaya Ruwatan Bumi di Kampung Adat Banceuy**

Ruwatan untuk wilayah atau desa yang luas umumnya diselenggarakan melalui pagelaran pewayangan, sesuai yang tercantum dalam buku Tradisi Ruwatan (Pamungkas, 2008 hlm. 62) Upacara Ruwatan Bumi umumnya mengikuti struktur baku atau aturan pokok yang telah disepakati secara adat setiap tahunnya. Pelaksanaannya berlangsung selama dua hari, dengan setiap tahap diawali oleh ritual yang memiliki nilai sakral. Pada hari pertama, rangkaian kegiatan dimulai dengan prosesi dadahut, nyawen, ngadiukeun, ijab kobul (pemotongan kerbau), ngalawar, sholawatan, dan pertunjukan seni tradisional seperti gembyung dan pewayangan. Sedangkan pada hari kedua, acara dimulai dengan tumpengan, *numbal*, *ngarak Dewi Sri*, *nyawer Dewi Sri*, *Ijab Rasul*, dan *pertunjukan wayang golek* (Saleh Afif, 2020 hlm. 50).

Ruwatan bumi atau ngaruwat bumi berasal dari kata "rawat" atau "ngarawat" dalam Bahasa Sunda, yang secara umum berarti mengumpulkan atau merawat (Pamungkas, 2008 hlm. 2). Konsep ngaruwat bumi mengacu pada upaya untuk mengumpulkan seluruh masyarakat dan hasil bumi, termasuk bahan mentah, setengah jadi, maupun yang sudah jadi. Tujuan dari upacara ngaruwat bumi adalah untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil bumi yang diperoleh, serta sebagai tindakan untuk menolak bala dan menghormati para leluhur atau karuhun (Saleh Afif, 2020 hlm. 48). Dalam tradisi ruwatan bumi, (Pamungkas, 2008 hlm. 62) terdapat beragam kegiatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat :

- a) Berbagai Macam Ritual
- b) Pertunjukan Tari Tradisional
- c) Pertunjukan Musik Tradisional
- d) Pertunjukan Wayang Golek



## B. Penelitian Terdahulu

Adapun dibawah ini penelitian yang terdahulu diteliti dan membahas terkait pembahasan yang berkonteks dengan Transformasi Tradisi Budaya Ruwatan Bumi Kaitannya Dengan Nilai-Nilai Sila Pertama Pancasila penelitian di lingkup perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Robby (2017). *Peristiwa Tradisi Ruwatan Bumi di Kampung Adat Banceuy Pada Tahun 2000*, Menurut penelitian Robby tahun 2017, Tradisi ruwatan bumi di Kampung Adat Banceuy, yang dikenal sebagai upacara ngaruwat bumi, terus berlangsung hingga sekarang dan menjadi sorotan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek sejarah dan budaya dalam konteks kekayaan lokal budaya di wilayah tatar Sunda.
2. (Rismaya, 2016) *Analisis Nilai Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Desa Sebagai Upaya Pembentukan Civic Culture Pada Masyarakat 2016*, Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, temuan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi ruwatan desa, budaya gotong royong yang telah terbentuk dalam masyarakat menjadi hal yang penting.
3. (Zulfa U, 2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Pembahasan penelitian ini tentang tradisi ruwatan untuk perkawinan anak tunggal menekankan nilai-nilai Sila Ketuhanan, berbeda dengan skripsi yang lebih fokus pada tinjauan hukum Islam.
4. (Kosim, 2016). *Nilai Moral Dalam Tradisi Saparan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 2016*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral terjaga melalui tradisi Saparan: religius, gotong royong, silaturahmi, solidaritas, dan kerukunan.
5. (Ramadhan, 2019). *Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Ditinjau Dari Fiqih Syisah 2018*, Berdasarkan temuan penelitian bahwa penerapan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menguatkan kedaulatan Tuhan di Indonesia dengan larangan terhadap yang tidak diperintahkan dan pelaksanaan yang diperintahkan, serta

memandangnya sebagai prinsip-prinsip seperti persaudaraan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, dan keadilan dalam fiqih siyasah, terutama dalam hukum.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Konsep kerangka pemikiran merujuk pada gambaran narasi atau proposisi mengenai struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam pemecahan masalah, model konseptual bagaimana teori yang ada saling berhubungan dengan beberapa faktor yang ada (Sugiyono, 2017 hlm. 60). Kerangka berpikir kognitif ini memiliki peran krusial menentukan keseluruhan ketepatan proses penelitian, diperlukan penjelasan tegas mengenai asal-usul permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, hal ini menjadi acuan yang diperlukan dalam penyajian hasil penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan meliputi kegiatan meneliti dalam wawancara kepada narasumber secara langsung ke tempat yang bersangkutan, menganalisis mengenai prosesi tradisi ruwatan bumi, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam budaya ruwatan bumi tersebut, meneliti prosesi yang berkaitan dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila. Tujuannya adalah memperkuat identitas nasional dan mendorong masyarakat untuk melestarikan tradisi ruwatan bumi serta warisan budaya bangsa.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

